

Tanggapan Kerangka Ekonomi Makro APBN 2022

Bhima Yudhistira

KEYWORD DALAM KERANGKA EKONOMI MAKRO 2022

Keyword	Narasi Pemerintah	Fakta
Countercyclical	Kebijakan pemerintah luar biasa dan responsif ditengah covid19	Kebijakan fiskal justru kontraproduktif, pemberian PPNBM kendaraan bermotor, stimulus penurunan PPH kepada korporasi tapi mau menaikkan tarif PPN dan tax amnesty jilid II
Pemda lambat serap anggaran	Masih ada Rp100 triliun dana pemda di akhir 2020 yang ditahan di bank	Pemda kesulitan masalah teknis penyesuaian PEN, UU No.2 /2020, Pemda antisipasi merosotnya PAD dan transfer dari pusat. Dana PEN pemerintah pusat sendiri cuma terserap 83% tahun lalu.
Pemda terlalu gemuk di belanja pegawai	Pada tahun 2019 rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah (2,65%), porsi belanja pegawai masih tinggi, yaitu rata-rata 34,74% (bahkan di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9%)	Belanja pemerintah pusat juga masih gemuk di birokrasi yakni belanja pegawai sebesar Rp420 T(21%) dan belanja barang Rp358 T (18%).
Digitalisasi	Kondisi Covid-19, yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital	Menko Maritim Investasi mengajak pegawai negeri untuk work from Bali, pemborosan anggaran perjalanan dinas (tdk sinkron dgn digitalisasi)

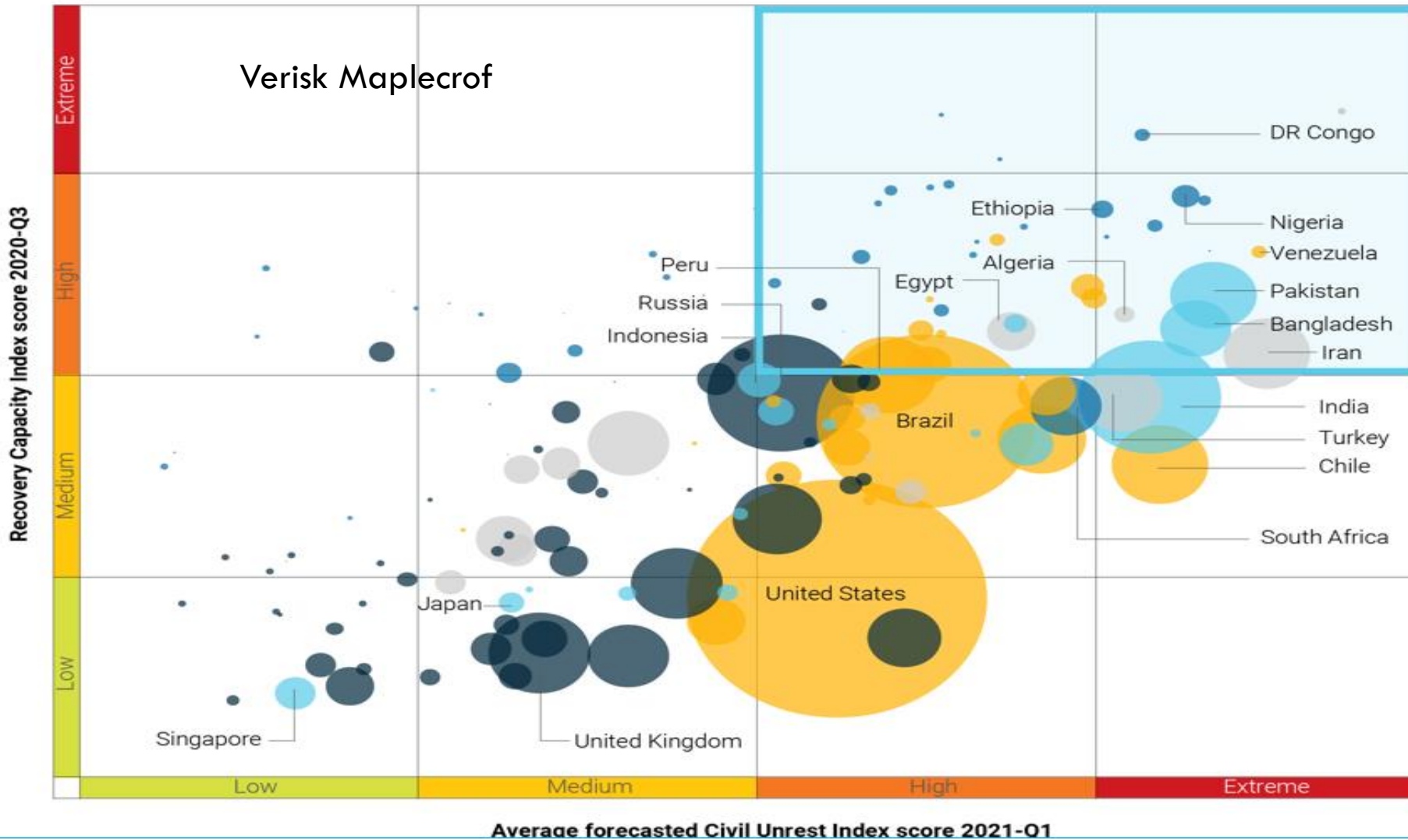
KEYWORD DALAM KERANGKA EKONOMI MAKRO 2022

Keyword	Narasi Pemerintah	Fakta
Crowding Out Effect	Pemerintah menjaga agar tidak terjadi crowding out effect yang menurunkan peran investasi swasta	Crowding Out Effect sudah terjadi. Pada 2020 terjadi kenaikan signifikan penempatan dana perbankan di SUN
Rasio utang terkendali	Rasio utang akan tetap terkendali dikisaran 43,7% sd 44,2% PDB	Hampir sulit, per Maret 2021 sudah 41,6% naik signifikan dari Maret 2020 di 32,1%. Naik hampir 10% dalam 1 tahun.
SWF /LPI	upaya mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF LPI, terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan,	Belum ada progress signifikan dari SWF, baru sebatas komitmen investasi UEA
Taper tantrum	Pemerintah mewaspadaai taper tantrum	Terlambat untuk antisipasi karena isu taper tantrum sudah mulai sejak desember 2020 (kenaikan US Treasury yield).
High cost economy	Iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta <i>high-cost economy</i> menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor.	KPK dilemahkan & pembangunan infrastruktur tidak berkorelasi terhadap penurunan biaya logistik (masih 23,5% PDB)

RISIKO GLOBAL DALAM 5 TAHUN KEDEPAN

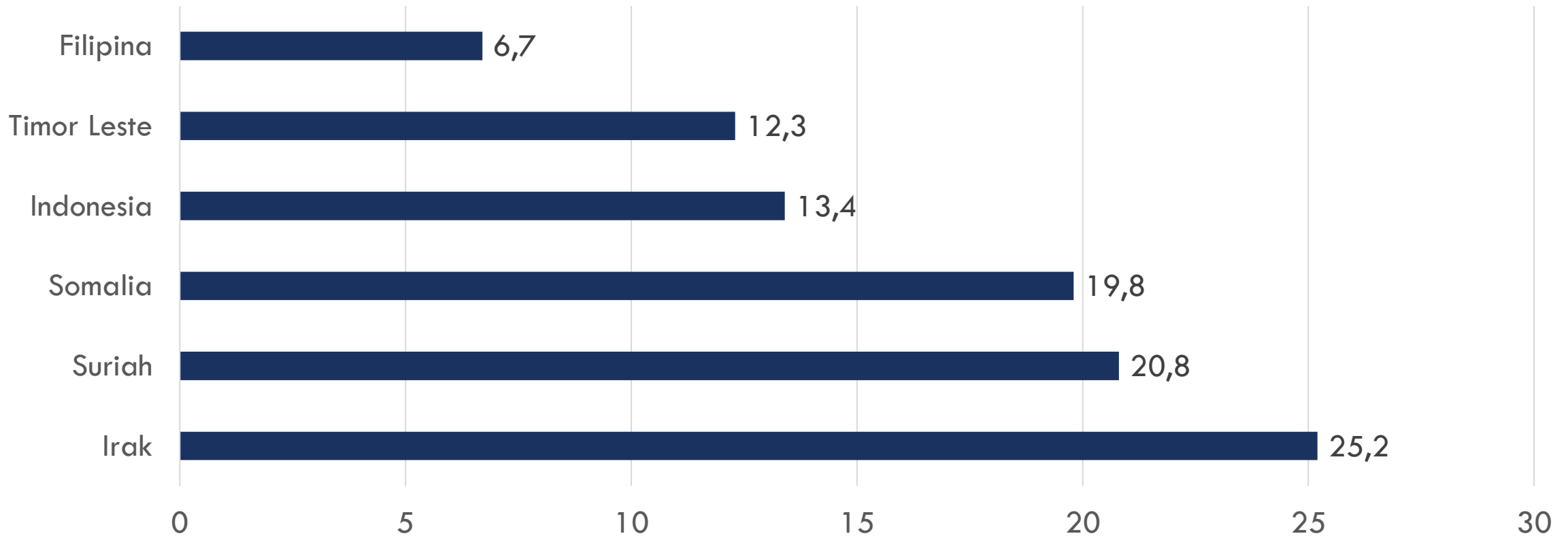


37 NEGARA DI DUNIA AKAN MENGALAMI GUNCANGAN SOSIAL-POLITIK PASKA COVID-19



TINGKAT PENGANGGURAN USIA MUDA YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tingkat pengangguran usia muda (%) ILO Model



COVID-19 DAN VAKSINASI



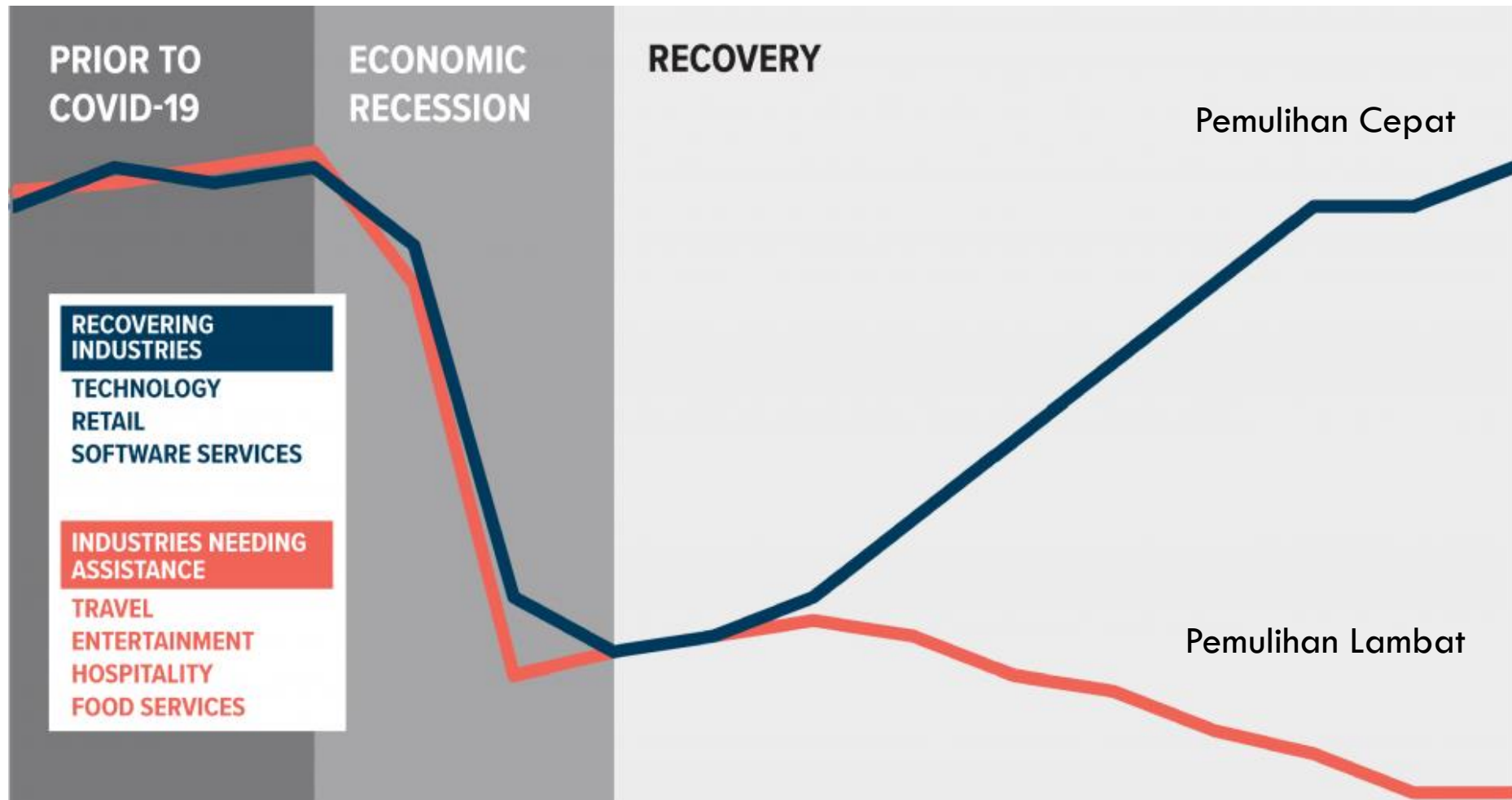
Target Herd Immunity: 70% penduduk atau 181,5 juta orang
Progress vaksin 1 dosis: 7,1%
Progress vaksin 2 dosis: 4,9%

13 juta jiwa telah menjalani vaksinasi dosis pertama

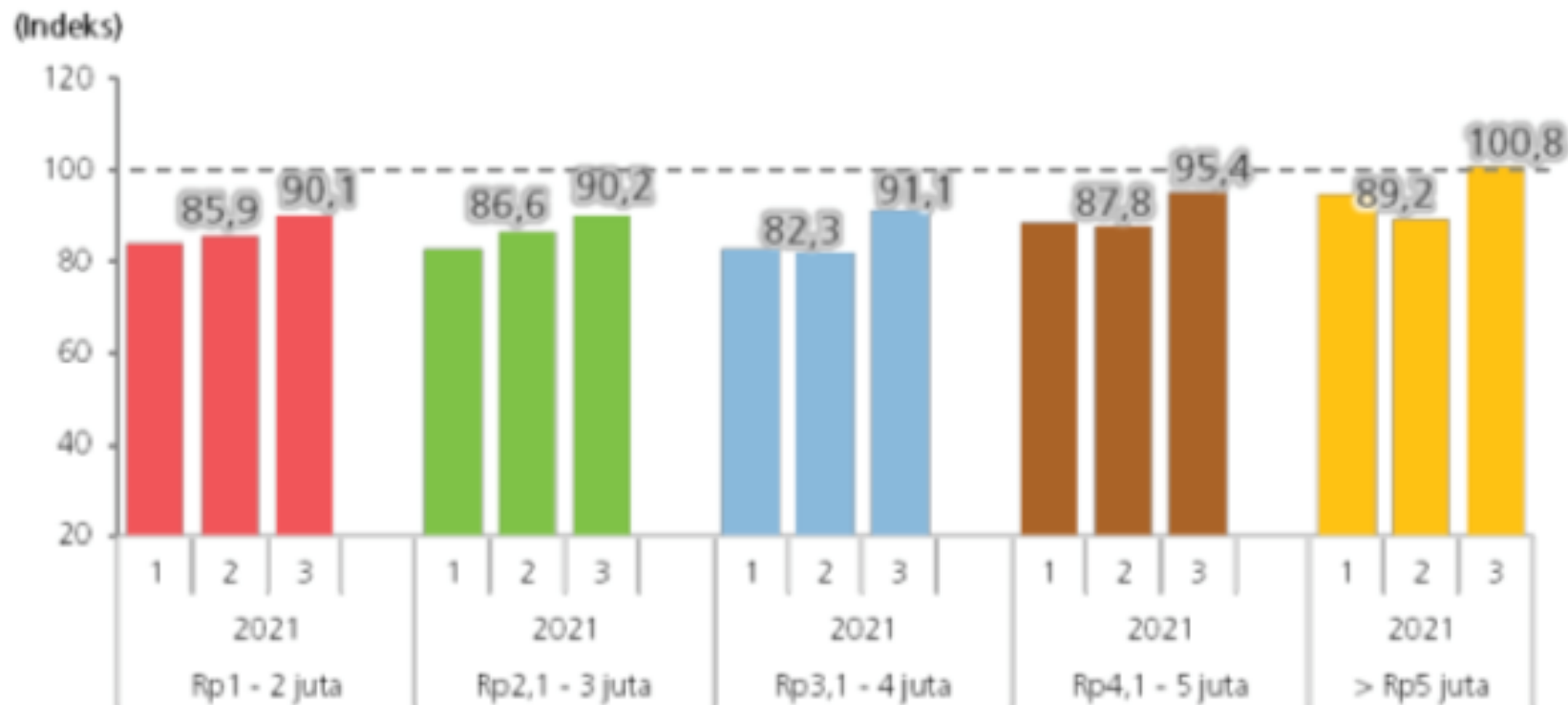
© Sabtu, 8 Mei 2021 17:22 WIB



MODEL PEMULIHAN EKONOMI BERBENTUK HURUF K-SHAPED



KEPERCAYAAN KONSUMEN TIAP KELOMPOK PENGELUARAN BERBEDA

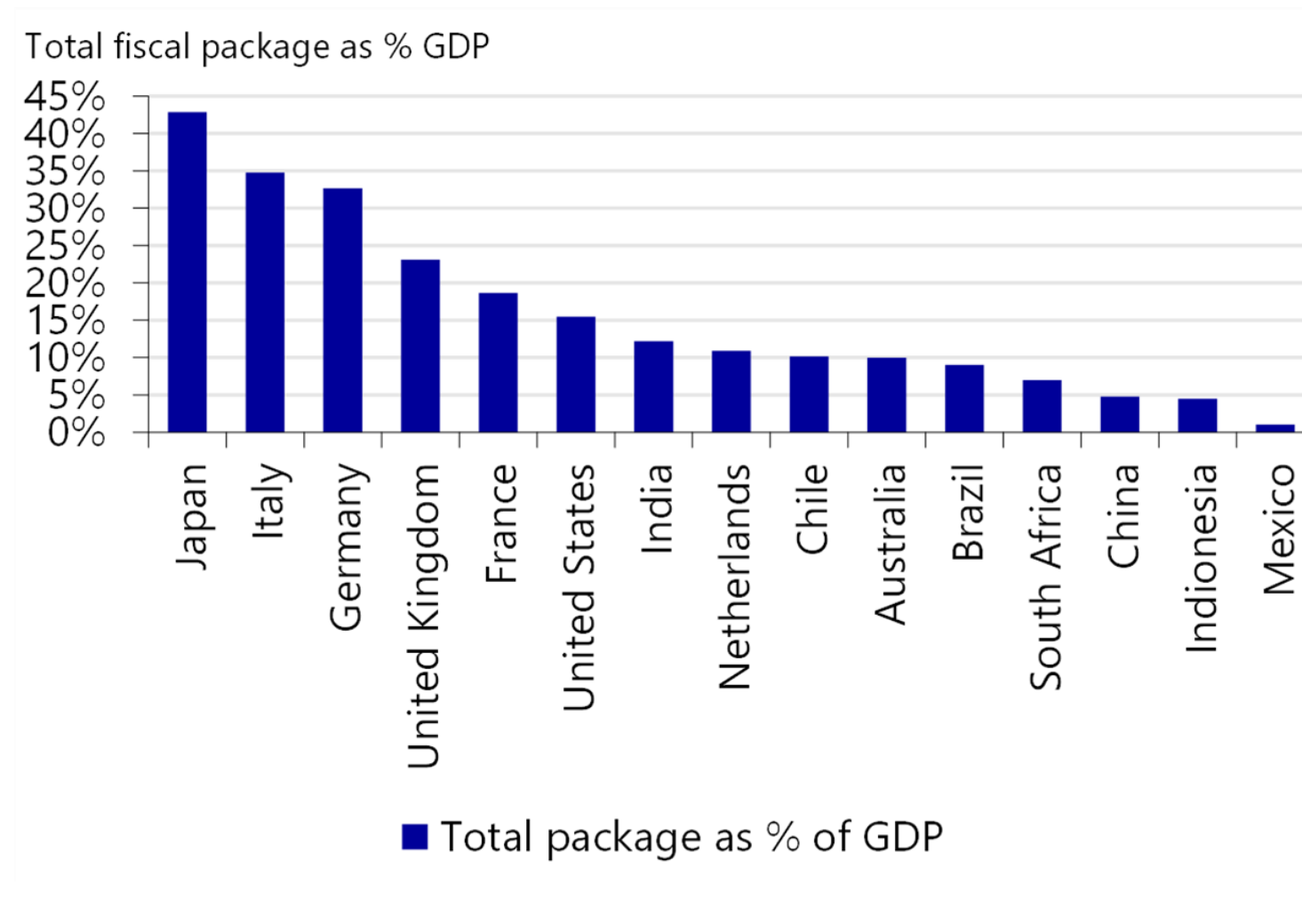


Sumber: IKK BI Maret 2021

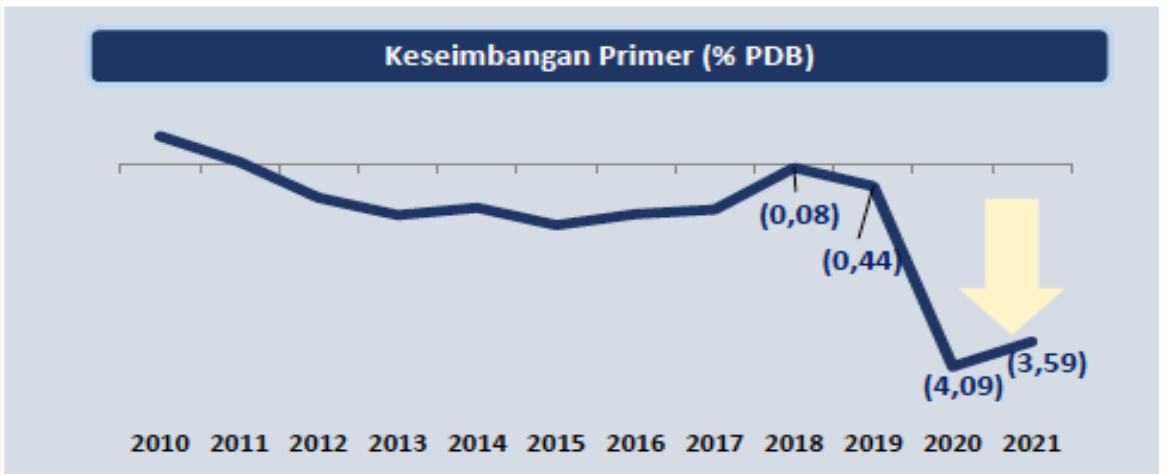
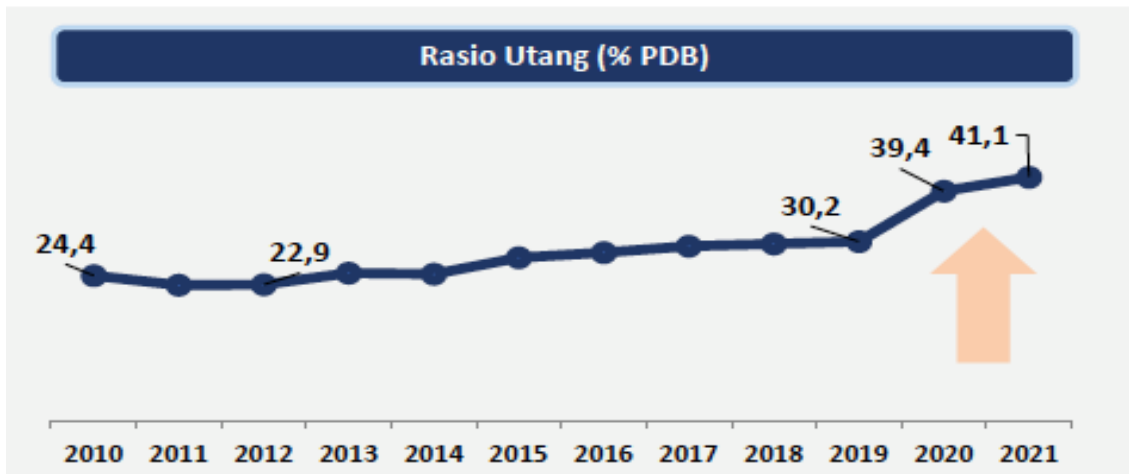
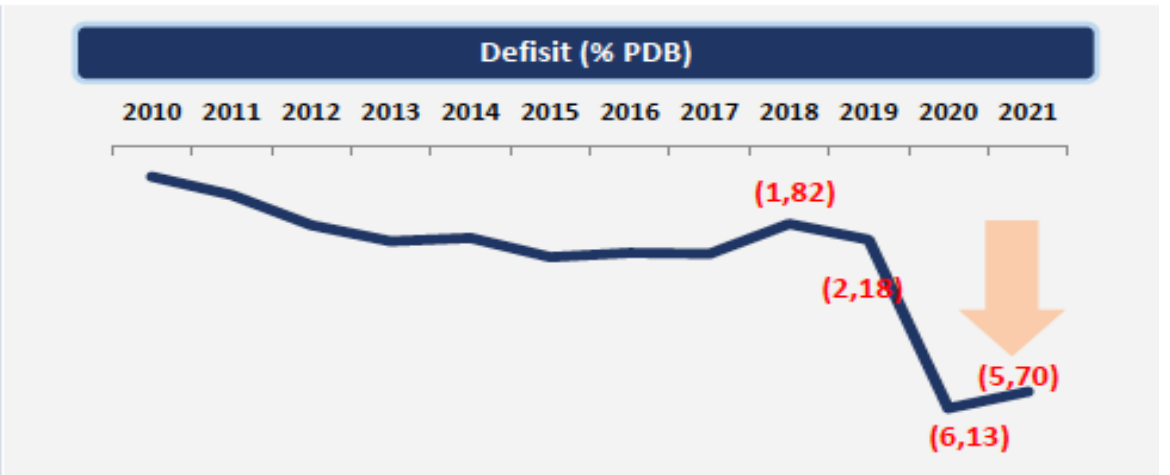
MEWASPADAI ANCAMAN GELEMBUNG ASSET DIGITAL



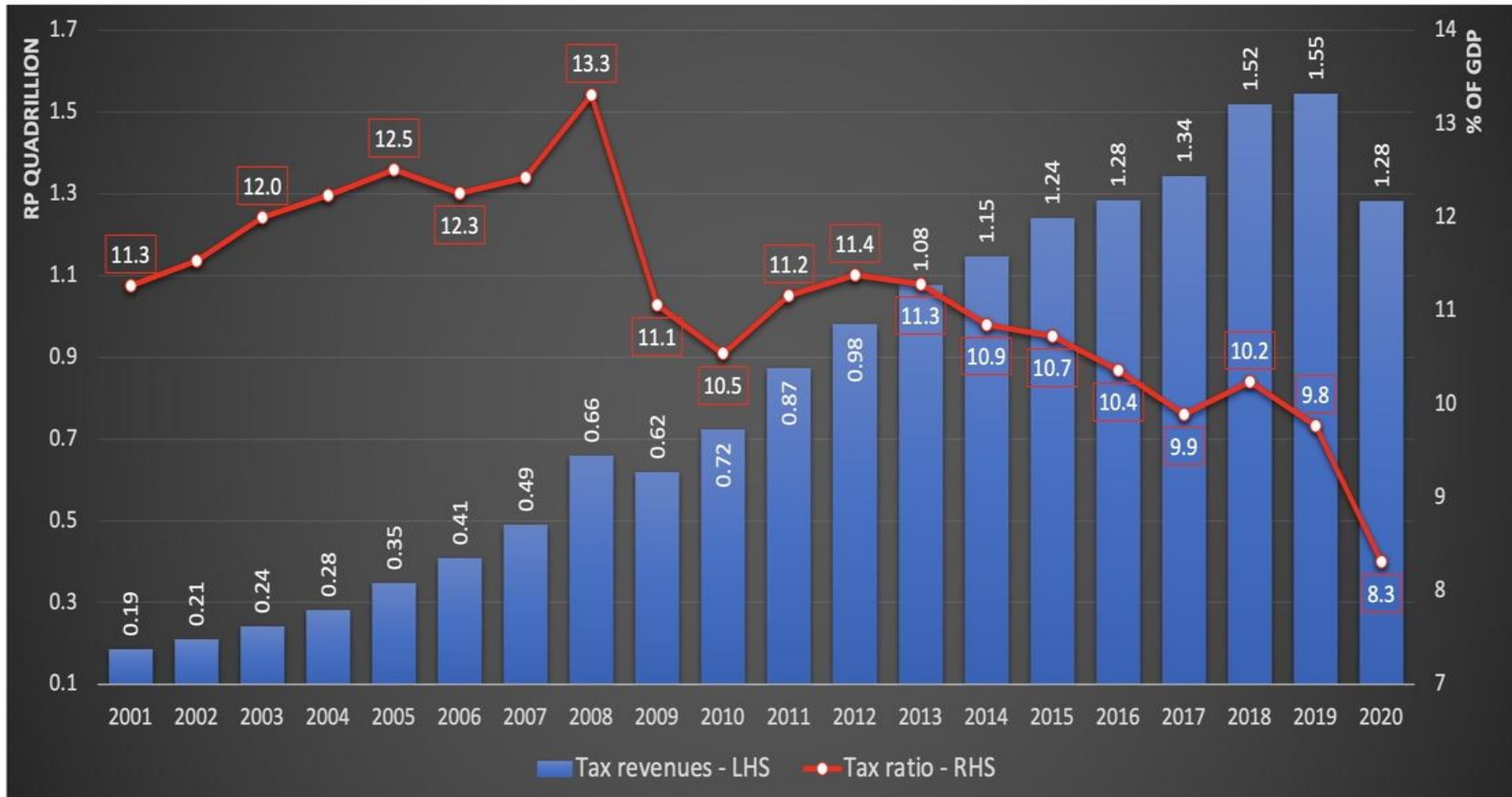
TANTANGAN: STIMULUS RELATIF RENDAH, TIDAK BISA BERHARAP PADA DANA APBN SEPENUHNYA.



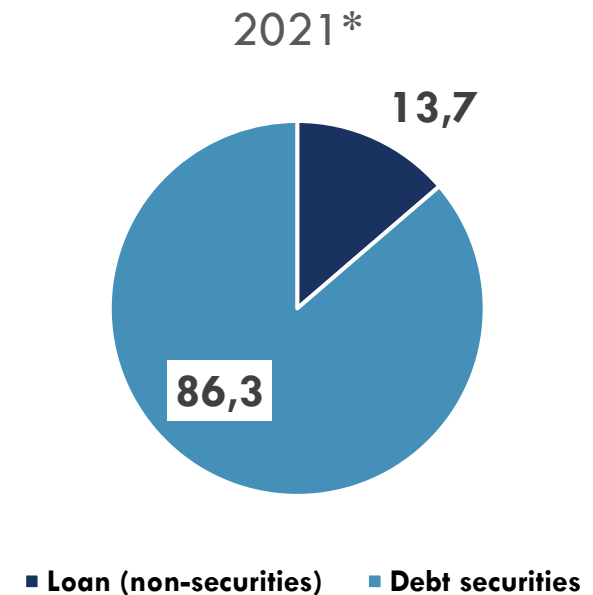
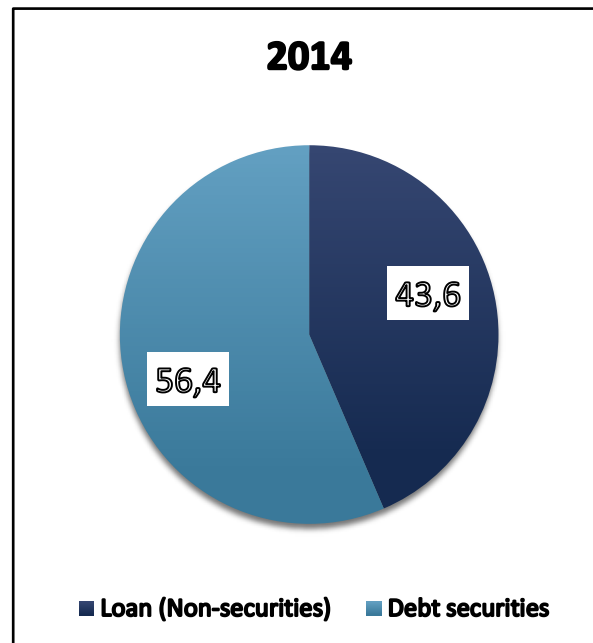
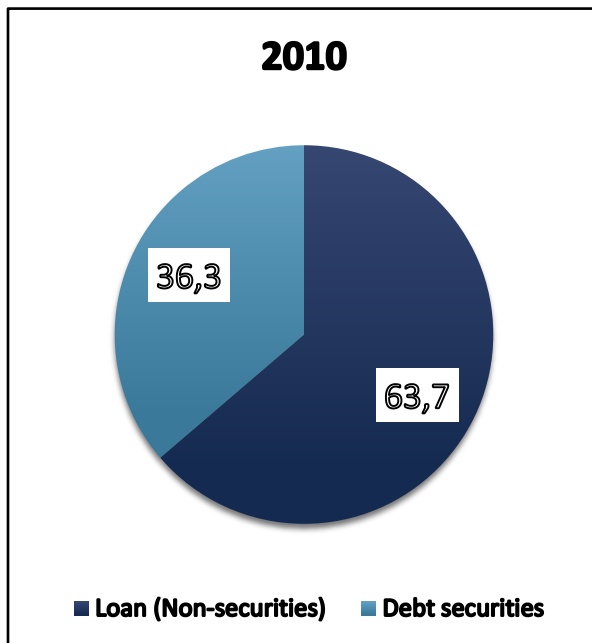
KONDISI EXISTING MASALAH APBN



TAX RATIO TERENDAH PASKA TAX AMNESTY, ADA YANG SALAH?



PEMBIAYAAN BERBENTUK SUN TERUS MENDOMINASI, TINGKATKAN RISIKO KEUANGAN



Sumber: Kemenkeu, *% per Februari 2021

KESIMPULAN

- Narasi pemerintah masih optimistis tapi banyak kebijakan yang kontradiksi dengan upaya pemulihan ekonomi
- Pemerintah masih overshoot menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8% di 2022
- Inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dari asumsi pemerintah 2-4% karena ada kebijakan kenaikan tarif PPN dan naiknya harga komoditas (minyak, CPO dll)
- Rupiah cukup berat dijaga pada kisaran 13.900-15.000, faktor taper tantrum bisa buat rupiah ke 16.000-17.000 (fenomena 2013 bisa terulang)
- Kondisi utang harus segera dikendalikan, tidak saja melihat pada rasio utang tapi indikator lain seperti Debt to Service Ratio (DSR), rasio pembayaran bunga utang dibanding penerimaan Negara, dan beban utang jatuh tempo serta kemampuan pasar menyerap SBN
- Fokus pada pengendalian wabah covid19 hingga 2022 (sampai kasus menurun signifikan), dan perlindungan sosial



Thank You

Bhima Yudhistira Adhinegara

+6281318168622

bhima@indef.or.id



INDIKATOR RISIKO EKONOMI 2021

Indikator		Penilaian Risiko	Implikasi
Defisit APBN	6,09%	Cukup tinggi	Penambahan utang, dan penghematan belanja
Debt to Service Ratio (DSR)	30,14%	Cukup tinggi	Penurunan cadav dan rupiah untuk membayar kewajiban ULN
Rasio Bunga terhadap Belanja Pemerintah Pusat	19%	Cukup tinggi	Ruang fiskal semakin sempit, berdampak ke kapasitas stimulus ekonomi
Yield SBN	6,79%	Cukup tinggi	Beban pembiayaan utang pemerintah semakin berat
Depresiasi Kurs Rupiah*	14.400-14.500	Cukup tinggi	Harga barang impor semakin mahal
Nett buy/ Nett sells asing di pasar saham	-4,49 triliun	Cukup tinggi	Modal asing keluar, risiko taper tantrum
Inflasi tahunan*	1,37%	Moderat	Inflasi rendah karena sisi permintaan belum pulih
DER (Debt to Equity Ratio) BUMN**	2,7-6 kali	Risiko membahayakan	Risiko kontijensi ke APBN karena proyek dibackup pemerintah
Kredit bank	-2,15%	Cukup tinggi	Bank tahan penyaluran pinjaman, bunga masih mahal